KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**RINA P. SOEMARNO**
Jabatan	:	**Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	:	**MOH. MAHFUD MD**
Jabatan	:	**Menteri Koordintaor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada Tahun 2022 berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Jakarta, Januari 2022

PIHAK KEDUA,	**PIHAK PERTAMA,**
MOH. MAHFUD MD	**RINA P. SOEMARNO**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon I: Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif;	a. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	90%
	b. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional	90%
	c. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti	78%
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	a. Nilai SAKIP	A
	b. Nilai PMPRB	30
	c. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4
	d. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	85

Jumlah Anggaran Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang Politik Luar Negeri adalah sebesar *Rp10.173.676.000.-* (Sepuluh Miliar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Republik Indonesia

MOH. MAHFUD MD

Deputi Bidang Koordinasi
Politik Luar Negeri

RINA P. SOEMARNO

DOKUMEN MANUAL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI

Sasaran Strategis 1	**Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif**
Indikator Kinerja 1	**Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional**
Definisi	Mengukur sejauh mana capaian target pembangunan bidang politik luar negeri pada K/L di bawah koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri sesuai dengan Dokumen Perencanaan Nasional. Target pembangunan bidang politik luar negeri pada K/L yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri yaitu: a. Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri (Target 2022=88); b. Indeks Citra Positif Indonesia di mata dunia internasional (Target 2022=3,85); c. Jumlah Forum yang Dipimpin Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral (Target 2022=13).
Sumber Data	Capaian target pembangunan bidang politik luar negeri pada K/L yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri yaitu: a. Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri; b. Indeks Citra Positif Indonesia di mata dunia internasional c. Jumlah Forum yang Dipimpin Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral
Cara Menghitung	$\text{Capaian} = \frac{A + B + C}{3}$ $A = \frac{\text{Capaian Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri Tahun 2022}}{88} \times 100\%$ $B = \frac{\text{Capaian Indeks Citra Positif Indonesia di mata dunia internasional Tahun 2022}}{3{,}85} \times 100\%$ $C = \frac{\text{Capaian Jumlah Forum yang Dipimpin Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral Tahun 2022}}{13} \times 100\%$

Indikator Kinerja 2	**Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional**
Definisi	Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan dapat mendukung terhadap pembangunan bidang Politik Luar Negeri yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Nasional. Isu Dokumen Perencanaan Nasional yang akan didukung pada rekomendasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri yaitu: a. Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri pada Sub IKU-1 (Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di luar negeri) dan Sub IKU-4 (Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri); b. Indeks Citra Positif Indonesia di mata dunia internasional pada dimensi *people* dan *goverment*; c. Jumlah Forum yang Dipimpin Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral dalam mendukung keketuaan ASEAN pada tahun 2023; dalam mendukung Optimalisasi Kontribusi Indonesia pada sidang PBB; dalam mendukung proses aksesi Indonesia untuk dapat diterima sebagai full member pada Financial Action Task Force (FATF)
Sumber Data	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan pada unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri yang mendukung Dokumen Perencanaan Nasional.
Cara Menghitung	$\text{Capaian} = \frac{A + B + C}{3}$ $A = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang mendukung Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri}}{\text{Total Rekomendasi pada Unit Deputi Bidkoo Pollugri}} \times 100\%$ $B = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang mendukung Indeks Citra Positif Indonesia di mata dunia internasional}}{\text{Total Rekomendasi pada Unit Deputi Bidkoo Pollugri}} \times 100\%$ $C = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang mendukung Jumlah Forum yg Dipimpin Indonesia pada Tingkat Regional \& Multilateral}}{\text{Total Rekomendasi pada Unit Deputi Bidkoor Pollugri}} \times 100\%$
Indikator Kinerja 3	**Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti**
Definisi	Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang Politik Luar Negeri yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan *follow up* atas rekomendasi yang

	dihasilkan serta memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.
Sumber Data	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan pada unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait.
Cara Menghitung	$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan pada unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri yg ditindaklanjuti K/L terkait}}{\text{Jumlah capaian rekomendasi kebijakan pada unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri}} \times 100\%$
Sasaran Strategis 1	**Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal**
Indikator Kinerja 1	**Nilai SAKIP**
Definisi	Evaluasi implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian rekomendasi untuk peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi kerja pemerintah.
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar negeri yang dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam
Cara Menghitung	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan kategori hasil penilaian : 1. AA (90-100) 2. A (80-90) 3. BB (70-80) 4. B (61-70) 5. CC (51-60) 6. C (31-50) 7. D (0-30)
Indikator Kinerja 2	**Nilai PMPRB**
Definisi	Nilai PMPRB adalah nilai yang diperoleh dari penilaian mandiri unit kerja Deputi Bidkoor Pollugri melalui aplikasi pmprb.menpan.go.id atas upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai *good governance*.
Sumber Data	Laporan penilaian mandiri melalui aplikasi pmprb.menpan.go.id yang dilakukan bersama oleh unit kerja Deputi Bidkoor Pollugri dengan Inspektorat Kemenko Polhukam
Cara Menghitung	Laporan penilaian mandiri pada setiap program dalam komponen pengungkit (proses), yaitu :

	1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tatalaksana 5. Penguatan Pengawasan 6. Penataan Sistem Manajemen SDM 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Indikator Kinerja 3	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi
Definisi	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Pollugri merupakan penilaian yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan tamu atau konsumen atas pelayanan sekretariat. Tingkat kepuasan diperoleh dengan membandingkan pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diharapkan.
Sumber Data	Laporan hasil survey Layanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
Cara Menghitung	Laporan hasil survey Layanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri kepada *stakeholder* Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, baik internal Kemenko Polhukam maupun external Kemenko Polhukam. Nilai yang diambil adalah nilai yang paling sering muncul (*modus*) pada hasil perhitungan survei.
Indikator Kinerja 3	**Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi**
Definisi	Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) adalah penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) program.
Sumber Data	Laporan penilaian oleh unit kerja Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Kemenko Polhukam
Cara Menghitung	Laporan penilaian berskala 1-100 dengan menghitung 2 unsur, yaitu unsur perencanaan (50 poin) serta unsur evaluasi dan pelaporan (50 poin).

Jakarta, Januari 2022
Deputi Bidang Koordinasi
Politik Luar Negeri

Rina P. Soemarno